

## **Chapter 3**

---

# **Methods and Approaches to Strengthen University-Community Engagement**



## Sharia Micro Financing Management on Women Moslem Community In Tulungagung

**BINTI NUR ASIYAH**

IAIN Tulungagung, Indonesia  
binti.advan@gmail.com

**Abstract:** This paper aims to empower women to management of Islamic micro financing so that the living standards of the members of the congregation more increases. The focus of this paper are, first, what is the problem of women moslem congregation in Tulungagung? Second, how to strengthen the management of Islamic micro finance congregation? Third, How to increase household economic management in the group women moslem congregation in Tulungagung? Fourth, how women's access to finance? Fifth, How to increase women entrepreneurship in the congregation women Moslem congregation in Tulungagung? Sixth, how the implementation of sharia economic socialization of women moslem congregation in Tulungagung? The method used in this devotion to community empowerment semi technical community based research (CBR) are realized in the form of training and mentoring to the needs of the proposed and implemented by congregation. The first result of this devotion, women moslem congregation problem is the need to strengthen the management of savings, training and venture capital to increase revenue. second, strengthening the management of Islamic microfinance services performed by the savings management training, financing. Thirdly, the management of the household economy with FGD economic management to plan household budgets and spending family. Fourth, access to financing for the congregation performed by allocating funds for Rp.12.150.000 empowerment, - for financing activities, Fifth, increase entrepreneurial skills training conducted with instant ginger, Sixth, socialization of Islamic economics is done with FGD Islamic economics, solidified use saving deposits, murabaha financing and qardh. At the end of the devotion shown an increase in savings, increase saving congregation.

**Keywords:** Management, Islamic micro finance, women moslem

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami tahun kenaikan. Pada tri wulan pertama 2015, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,71 persen.<sup>1</sup> Sedang pada 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen.<sup>2</sup> Artinya selama *year on year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 0,2 persen atau tumbuh sebesar 4.79 persen pada *year on year* melambat jika dibandingkan pada pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Menurut Kepala BPS, Suryamin, penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia atau kurang memenuhi target pada quartal I disebabkan oleh *faktor produksi* dan *faktor konsumsi*. Faktor produksi disebabkan oleh produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam, Produksi minyak mentah dan batu bara mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak tumbuh negatif, Distribusi perdagangan melambat karena menurunnya pasokan barang impor (barang dan modal maupun bahan baku), serta kinerja konstruksi mengalami keterlambatan realisasi belanja infrastruktur. Sementara dalam hal konsumsi, semua komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) melambat, pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlamat.<sup>3</sup> Hal tersebut banyak dikendalikan oleh kurs mata uang, dan pencabutan subsidi (listrik, BBM). Mata uang rupiah terdepresiasi terhadap dollar Amerika Serikat. Dampak dari terdepresiasinya rupiah sangat dirasakan oleh masyarakat berupa naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Tidak hanya harga kebutuhan pokok yang naik, semua sendi kehidupan mulai upah buruh juga menuntut untuk dinaikkan. Wal hasil, perusahaan-perusahaan, industri rumah tangga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasional, persediaan dan lemahnya daya beli masyarakat. Hal demikian perlu adanya penguatan kepada masyarakat, bagaimana penguatan ekonomi dapat dilakukan.

Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga tarif listrik artinya mencabut subsidi listrik 1300VA sd 2200 VA untuk rumah tangga kecil

---

<sup>1</sup> Bappenas nilai pertumbuhan ekonomi 5,1% cukup kredibel, diakses melalui <http://m-okezone.com> pada 10 Juni 2016

<sup>2</sup> Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014, diakses melalui <http://www.bps.go.id> pada 14 Juni 2015

<sup>3</sup> Estu Suryowati, Pertumbuhan Ekonomi kuartal I-2015 melambat, ini penyebabnya, diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com>

dengan tegangan rendah dan.<sup>4</sup> Pencabutan subsidi listrik tersebut sangat dirasakan oleh pelaku UMKM karena dengan dicabutnya subsidi listrik akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional usaha. Dengan meningkatnya biaya operasional, maka pelaku UMKM akan menjual produknya dengan harga yang lebih mahal. Hal ini menyebabkan konsumen menurun kemampuan membelinya. Tidak hanya produsen dan konsumen yang berdampak oleh pencabutan subsidi listrik, melainkan semua barang dan jasa akan mengalami penyesuaian.

Penyesuaian (kenaikan atau penurunan) tarif listrik tersebut lebih disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan listrik diantaranya adalah nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang rupiah, *Indonesian Crude Price (ICP)* dan Inflasi.<sup>5</sup> Kondisi tersebut tak ayal membuat tarif listrik setiap bulannya mengalami perubahan, baik harga naik atau sekalipun turun. Namun pada realitasnya sering mengalami kenaikan dari pada penurunan. Kondisi tersebut berdampak secara langsung terhadap penyediaan barang dan jasa di masyarakat.

Upaya penguatan ekonomi di atas diperlukan sinergi dari berbagai pihak. Penguatan perekonomian di masyarakat sangat tergantung oleh peran intermediasi perbankan, terutama adalah peran bank syariah maupun lembaga keuangan non bank syariah. Sebagaimana pengalaman bank syariah, bank syariah aman terhadap kondisi krisis pada tahun 2008. Sebagaimana yang dipublikasikan Bank Mu'amalat Indonesia:

Pada tahun 2008 di saat krisis global melanda seluruh dunia, Bank Muamalat telah menunjukkan kinerja positif, bahkan hingga Juni tahun 2009. Pertumbuhan Aset Bank Muamalat sendiri meningkat 31,9% dari Rp.11,2 Triliun pada Juni 2008 menjadi Rp.14,8 Triliun pada Juni 2009 ini. Selain itu, Muamalat juga menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 32,5% dari Rp.9,34 Triliun pada Juni 2008 menjadi Rp. 12,38 Triliun pada Juni 2009. Pertumbuhan tersebut juga dialami oleh pertumbuhan penyaluran

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia no 9 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 301 tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara, pasal 5 ayat 1 a dan b.

<sup>5</sup> Ibid pasal 5 ayat 2

pembiayaan sebesar 15,8% dari Rp.9,61 Triliun pada Juni 2008 menjadi Rp.11,13 Triliun pada Juni 2009.<sup>6</sup>

Hal demikian menjadi harapan bahwa hadirnya bank syariah mampu berperan di tengah pelemahan rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelesuan. Namun demikian bukan tanpa masalah, mengingat bank syariah masih terbatas keberadaannya, masih terkonsentrasi di pusat kota, maka diperlukan lembaga sejenis yang mampu menjembatani kebutuhan modal, penyimpanan uang untuk menyisihkan pendapatan keluarga. Hal itu mampu dijawab oleh lembaga keuangan mikro syariah dimana akses lembaga tersebut mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan keberadaan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah yang telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan kalangan akademisi di tingkat perguruan Tinggi. Hal itu dibuktikan dengan perkembangan pendidikan Tinggi Islam Negeri dan Swasta yang berlomba-lomba membuka prodi Ekonomi Syariah / Perbankan Syariah. Banyaknya lembaga keuangan syariah diperlukan peningkatan pemahaman ekonomi Islam di masyarakat. Sehingga hadirnya lembaga keuangan syariah diterima dan menjadi pilihan oleh masyarakat dirasakan semakin mendesak.

Salah satu implementasi yang telah diterapkan oleh masyarakat dari system dan pengelolaan ekonomi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya Lembaga Keuangan Syariah / LKS baik makro (Bank Syariah, BPRS, dll) ataupun mikro (BMT, Kopsyah, dll) dan lembaga keuangan syariah non bank syariah lainnya. Lembaga yang disebut terakhir ini selama ini telah diterapkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini juga berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk menabung kian meningkat dalam menyiapkan kebutuhan masa depan.

Masyarakat yang tanggap akan fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah bersinggungan erat dengan keberadaan perempuan. Perempuan dalam hidup bermasyarakat seringkali fokus untuk menyiapkan ekonomi keluarga dalam membantu peran suami untuk mencari nafkah. Keadaan ini disebabkan karena faktor keadaan dalam keluarga, bahwa tidak semua suami mendapatkan pekerjaan semestinya yang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Peran perempuan muncul dalam posisi sebagai seorang perencana dan sekaligus pelaksana dalam pemenuhan segenap aspek

---

<sup>6</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/berita/detail/terima-alpha-south-east-asia-award-bank-muamalat-hadirkan-direksi-baru#.VnpWi> BSPIU diakses pada 30 Nopember 2015

kebutuhan sebuah rumah tangga. Perempuan mewajibkan dirinya berfikir akan masa depan dengan berbagai cara, di mana salah satu solusinya adalah dengan membiasakan diri dengan cara menabung. Menabung adalah kegiatan dengan tujuan berjaga-jaga untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

Berangkat dari isu di atas, sebagaimana kebiasaan masyarakat pedesaan di Pulau Jawa, profesi dan pekerjaan ibu rumah tangga di Kabupaten Tulungagung juga tidak luput dari pekerjaan di sektor informal. Badan Pusat Statistik Tulungagung menyebutkan bahwa sekitar 77 persen penduduk di Kabupaten Tulungagung menekuni pekerjaan sebagai petani, Industri dan Perdagangan.<sup>7</sup> Data BPS Tulungagung juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin berjumlah 91.300 jiwa.<sup>8</sup> Kondisi tersebut representasi dari kelompok jama'ah yasin tahlil dimana mereka termasuk juga yang melekat pada kelompok masyarakat yang aktif seperti buruh tani, pedagang kaki lima, penjaja makanan di sekolah-sekolah, dll.

Dinamika yang demikian menjadi fokus menarik untuk dilakukan wahana pengabdian masyarakat pada kluster pengabdian masyarakat berbasis Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Kegiatan Pemberdayaan Jasa Keuangan Mikro Syariah pada perempuan Jama'ah Yasin Tahlil di Kabupaten Tulungagung. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan para jama'ah ibu-ibu Yasin Tahlil, sekaligus untuk mengenalkan umat Islam pada Ekonomi Syariah.

Jama'ah Yasin Tahlil desa Panjerejo memiliki kebiasaan menabung yang telah dilakukan di sela-sela kegiatan jama'ah. Sebagai bagian dari kelompok masyarakat, utamanya bagi golongan ekonomi menengah ke bawah, kebiasaan ini bagi mereka dalam relasi sosial menjadi sangat penting karena telah terbukti mampu berperan membantu anggotanya dan masyarakat sekitarnya dalam menyiapkan kebutuhan masa depan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat meskipun dalam bentuk dan nilai manfaat yang masih sangat sederhana.

Pendampingan ini merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan (*sustainability*) mengingat tetap survivalnya keberadaan jama'ah ibu-ibu yasin tahlil dan kegiatan tabungan yang terus berjalan serta usaha yang

---

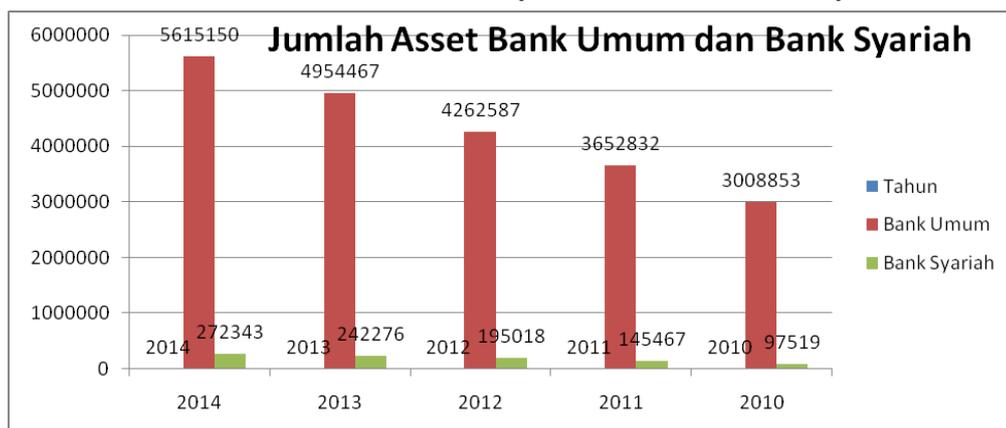
<sup>7</sup> Persentase [Penduduk](#) berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2012 diakses melalui <http://tulungagungkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/792> pada 30 Nopember 2015

<sup>8</sup> Ibid Jumlah dan penduduk miskin tahun 2010 - 2013

dilakukan oleh para ibu-ibu anggota jamaah di sektor informal juga berjalan secara kontinyu tentu bisa dijadikan pintu masuk untuk mengenalkan konsep aqad-aqad ekonomi syariah dan mendorong terbentuknya lembaga keuangan syariah yang bersifat non formal di jamaah yasin tahlil di Tulungagung. Hal inilah yang diyakini bisa terwujudnya kegiatan dan keberlanjutan pendampingan ini bisa dilaksanakan.

Selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (khususnya anggota jamaah ibu-ibu yasin tahlil), maka dengan pengabdian pemberdayaan jasa keuangan mikro syariah ini, faktor perkembangan perbankan syariah yang belum maksimal karena belum sesuai target Bank Indonesia selaku pengendali moneter akan terbantu. Dalam outlook Perbankan Syariah 2014, bahwa pada tahun 2013 Bank Indonesia menargetkan aset bank syariah pada posisi Pesimis (Rp.255.21 Trilyun), Moderat (Rp. 283.87 Trilyun) dan Optimis (Rp. 311.92 Trilyun).<sup>9</sup> Sebagaimana dalam statistik perbankan syariah (edisi Desember 2014) target tersebut pada kenyataannya hanya tercapai Rp. 272.34 Trilyun. Artinya bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah masih pada posisi mendekati moderat. Hal ini memerlukan strategi lebih lanjut untuk terus menggenjot pertumbuhan aset di bank syariah. Jika dibandingkan dengan data bank konvensional, maka besarnya aset bank syariah pada Desember 2014 hanya sebesar 4.85% dibandingkan total aset bank konvensional. Berikut grafik perbandingan jumlah aset bank syariah dan bank konvensional:

Grafik 1. Jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia & Statistik Perbankan Syariah edisi desember 2014

<sup>9</sup> Outlook Perbankan Syariah 2014 diakses dari [www.bi.go.id/id/ruang-media/.../-/BIOutlookPerbankanSyariah2014.pdf](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/.../-/BIOutlookPerbankanSyariah2014.pdf)

Jika dilihat dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa, perkembangan aset bank syariah dibandingkan bank umum masih jauh tertinggal, meskipun jika dilihat dari perkembangan aset yang dikelola bank syariah terus meningkat pada tiap tahunnya. Pertumbuhan aset bank syariah yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 49% di banding tahun 2010. Dan pertumbuhan melambat sampai dengan tahun 2014, dimana pertumbuhannya hanya sebesar 12% di banding tahun 2013. Pertumbuhan yang lambat tersebut harus dicari solusinya agar masa depan bank syariah dapat tumbuh dengan baik.

Jika melihat kondisi perbankan syariah yang masih tumbuh lambat baik asset ataupun jumlah lembaga keuangannya, maka diperlukan upaya untuk mempercepat dan memperluas pemahaman dan mengenalkan model dan sistem pengelolaan ekonomi Islam dan perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat. Upaya tersebut sangat relevan dengan dilakukannya pengabdian pemberdayaan jasa keuangan mikro syariah pada kegiatan jama'ah ibu-ibu yasin tahlil dalam nuansa ibadah dan mu'amalah.

Dengan dilakukannya pemberdayaan jasa keuangan mikro syariah bagi ibu-ibu jama'ah yasin Tahlil di Tulungagung, maka diharapkan mereka bisa berdaya. Berdaya dalam hal ekonomi, *personality*, sosial kemasyarakatan dan mental spiritual.

### **Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan atau *empowerment* adalah proses membangun dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi. Dalam organisasi yang telah diberdayakan akan tercipta hubungan di antara orang-orangnya yang saling berbagi kewenangan, tanggung-jawab, komunikasi, harapan-harapan, dan pengakuan serta penghargaan. Hubungan kerja semacam itu sangat berbeda dengan hubungan kerja yang secara tradisional didasari oleh hubungan hirarkhi dalam organisasi. Aset yang paling berharga dari suatu perguruan tinggi adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya yang ditunjukkan oleh pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, kreatifitas, motivasi dan kemampuan bekerjasama yang mereka miliki. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan

bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan<sup>10</sup>

Secara konseptual, Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris “*empowerment*” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”.<sup>11</sup> Karenanya, ide utama pemberdayaan beesentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai *berikut* : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.<sup>12</sup>

*Kemiskinan* dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tra-

---

<sup>10</sup> Sutoro Eko, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002

<sup>11</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan; Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat, (Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2007) hal 1.

<sup>12</sup> Priyono dan Pranarka, , Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, (Jakarta, CSIS, 1996)

disional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.<sup>13</sup>

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.<sup>14</sup>

Menurut Suharto Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), terutama kebebasan dalam mengemukakan pendapat, (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>15</sup>

Menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.<sup>16</sup> Mubyarto menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.<sup>17</sup> Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat

---

<sup>13</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)

<sup>14</sup> Ibid. Priyono dan Pranarka.

<sup>15</sup> Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005), hal 58

<sup>16</sup> Sumodiningrat, G, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1997)

<sup>17</sup> Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, (Yogyakarta: BPEE, 1998)

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai indikator pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Suharto dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: mikro, mezzo, dan makro.<sup>18</sup>

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk mamahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

---

<sup>18</sup> Suharto, Edi, Membangun...hal 66

## **Konsep dasar Lembaga Keuangan Syariah**

Banyaknya sektor informal disebabkan akumulasi penduduk di suatu wilayah yang tidak diikuti penyediaan kesempatan kerja formal luas. Penduduk dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah, cenderung masuk ke sektor informal. Mereka bekerja seadanya, lapangan usaha apa saja, jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan dan pendidikan yang tinggi (Sethuraman 1981, Mazumdar 1984, Adams 1995, Pitoyo, 1999). Menurut Departemen Perindustrian (1990) dalam Pitoyo, batasan sektor informal adalah sifat usaha yang tidak terorganisir, teknologi sederhana, lokasi usaha yang tidak tetap, jam kerja yang tidak pasti, modal kecil, tidak membutuhkan pendidikan dan ketrampilan yang tinggi, penghasilan rendah, relative menyerap tenaga kerja (padat karya). Dari teori di atas maka mayoritas pekerjaan/profesi yang dilakukan oleh para ibu-ibu jama'ah perempuan Yasin Tahlil di Kabupaten Tulungagung ini bisa digolongkan ke dalam sektor informal. Mereka pada umumnya adalah ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya menggeluti sektor yang seadanya.

Aktifitas ekonomi berskala kecil atau usaha-usaha sektor informal merupakan kegiatan usaha yang adaptif terhadap kondisi ekonomi bergulir syariah, yang akan meningkatkan usaha ekonomi dan kebutuhan seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pengolahan makanan, industri berteknologi rendah dan sederhana, serta jasa. Kondisi krisis memperlihatkan kemampuan sektor informal mampu bertahan ditengah tekanan kondisi ekonomi dan politik. Saat krisis ekonomi berkepanjangan, bencana bertubi-tubi, kelompok usaha informal mampu mempertahankan kelangsungan hidup mereka (*subsistensi*). Segala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki mengharuskan pelaku sektor informal melakukan aktifitas apa saja, terutama status pekerjaan usaha sendiri seperti buruh tani, peternak, pedagang kelontong, pedagang kaki lima agar kehidupan mereka dapat bertahan. Seperti kondisi para jama'ah perempuan, mayoritas mereka adalah ibu rumah tangga, buruh tani, peternak kambing, peternak sapi, petani dengan lahan yang kecil. Mereka banting tulang dalam kesehariannya menyempatkan di sela waktu sibuknya untuk mengikuti jama'ah yasin tahlil yang diselingi kegiatan ekonomi yang masih seadanya. Kegiatan seadanya yang dilakukan dengan menghimpun dana tabungan dengan skala kecil mingguan dan dicatat seadanya pula.

Menurut Boserup dalam *Womens Role in Economic Development* dinyatakan bahwa Perempuan sebagai bagian anggota masyarakat diharapkan juga turut berperan dalam pembangunan ekonomi (*Women In*

*Development (WID)* memberikan inspirasi atas berkembangnya konsep WID.<sup>19</sup> Upaya tersebut hendaknya diintegrasikan ke dalam perekonomian pasar yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang akan menjamin pendapatan bagi perempuan dan memberi kontribusi pada proses pembangunan melalui GNP.

## Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Johan Kristanto<sup>20</sup>, yang meneliti tentang efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, menunjukkan bahwa di wilayah Surabaya, bahwa efektifitas pelaksanaan ekonomi bergulir bagi pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan lembaga penyalur dana bergulir dan mensosialisasikan bahwa dana tersebut bukan hadiah dari pemerintah. Penelitian terdahulu meyakinkan bahwa dana bergulir di masyarakat bisa berjalan efektif, maka dalam penelitian dalam penelitian ini meyakinkan kepada penulis untuk menindaklanjuti lebih mendalam pelaksanaan jasa keuangan mikro syariah para perempuan yang sudah memulai potensi mu'amalat dengan melaksanakan tabungan.

Penelitian Kaspini<sup>21</sup> yang meneliti tentang Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif, dengan metode analisis regresi berganda menghasilkan kesimpulan bahwa secara bersama-sama pinjaman dana bergulir dan pendampingan berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif sebesar 54,3% sedangkan secara parsial pinjaman dana bergulir berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha produktif, sementara pemberdayaan tidak signifikan secara statistik berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif.

---

<sup>19</sup> Boserup, Esther, *Women Role in Economic Development*, dalam Mosse, Julia C. *Gender dan Pembangunan*, (terj.), (Jogjakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 1996)

<sup>20</sup> Johan Kristanto, Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, *Journal Publika*, volume 1 no 2 (2013).

<sup>21</sup> Kaspini, Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, (Thesis; Universitas Negeri Semarang, 2009) diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/4819/>

Kedua penelitian terdahulu ini membuktikan pinjaman dana bergulir sangat membantu kegiatan usaha produktif di masyarakat, maka selanjutnya ditindaklanjuti untuk memberikan program pemberdayaan berupa kegiatan usaha jasa keuangan mikro syariah. Dengan penelitian tersebut dalam pengabdian ini berupaya membuktikan dalam sebuah praktik pemberian pembiayaan, sekaligus pengelolaannya sehingga akan bisa meningkatkan kemampuan dan manfaat adanya lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu dengan pengabdian ini berupayakan membuktikan bahwa masyarakat akan terbiasa dengan lingkungan yang menerapkan ekonomi syariah.

## Metode Pengabdian

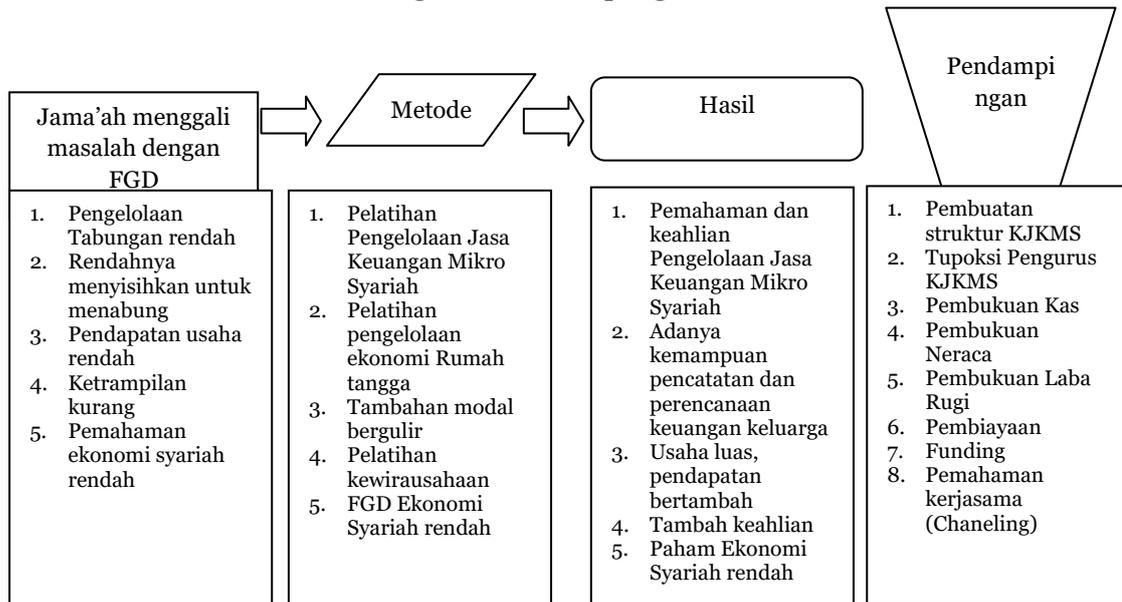
Pengabdian ini termasuk pengabdian berbasis semi *community base research*. *Community base research is a transformative model of research grounded on principles of community empowerment, collaboration, and social change in which the community of interest participates not as 'research subjects' but as research collaborators and agents of change*<sup>22</sup>. Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa dalam penelitian ini mengedepankan model transformatif, dimana mendasarkan pada pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dan perubahan sosial. Masyarakat bukan merupakan subjek maupun objek penelitian melainkan sebagai kolaborator. Dilakukan dengan senantiasa menggerakkan informasi dan kebutuhan dari komunitas dampingan yaitu ibu jama'ah yasin tahlil di Kabupaten Tulungagung. Permasalahan pengabdian digali dari jama'ah dimana pengelolaan tabungan sudah berjalan di jama'ah, dan adanya jama'ah menaruh harapan untuk meningkatkan tabungan yang dikelola, peningkatan pendapatan di kalangan jama'ah.

Langkah yang dilakukan dalam proses pengabdian dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Access Alliance Multicultural Health and Community Services, Community Based research toolkit*, 500-340 College Street, (Toronto, ON, Canada M5S 3G3; 2012) Hal 3

Bagan 2. Metode pengabdian



Jama'ah Yasin tahlil secara berkelompok mendiskusikan apa yang sudah dilakukan dalam jama'ah. Hasil yang bisa disimpulkan adalah perlunya pendampingan di dalam pengelolaan tabungan ke arah yang lebih bagus. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat atas tabungan yang dikelola. Kesempatan menabung jama'ah meningkat.

Ketika masalah sudah ditemukan, bahwa jama'ah menganggap penting dilakukan pendampingan, maka tim pendampingan mengurus perizinan kepada yang berwenang.

## Hasil dan Pembahasan Pengabdian

### Program Pra Kegiatan; Kegiatan Penyempurnaan Proposal

Pengabdian ini dilakukan dengan menggali langsung atas kebutuhan yang ada pada komunitas muslim di Tulungagung. Komunitas muslim yang menjadi mitra pengabdian adalah jama'ah Yasin Tahlil di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan. Penggalan masalah dilakukan dengan metode focus group discussion (FGD). Focus group discussion dilaksanakan di rumah ibu Surati selaku pimpinan jama'ah pada hari Minggu, 28 Juni 2015. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 6 orang peserta dari jama'ah dan 3 orang tim pengabdian serta 2 orang tim mahasiswa (untuk lapangan).

Hasil dari kegiatan focus group discussion penyempurnaan proposal adalah permasalahan yang harus diselesaikan di masyarakat adalah: *pertama*, Meskipun ikatan keagamaan yang kuat, namun pemahaman

terhadap pengelolaan pembiayaan berbasis mikro syariah masih kurang dimiliki, oleh karenanya diperlukan Focus group discussion ekonomi syariah. *Kedua*, Pengelolaan pembiayaan berbasis syariah, selesai 1 tahapan periode 6 bulan, oleh karenanya perlu adanya pendampingan terhadap pengelolaan pembiayaan mikro syariah. Artinya pembiayaan yang berhasil dilaksanakan belum mengakar, dan sepenuhnya dipahami oleh jama'ah maupun pengelola, maka rentan aktivitas tersebut tidak berbasis syariah lagi. *Ketiga*, Kemampuan jama'ah mengelola hasil keuntungan pembiayaan belum maksimal, apakah untuk penguatan modal atau peningkatan kapasitas usaha maka perlu adanya Focus group discussion pengelolaan usaha, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatan yang lebih.

### ***Kegiatan Sosialisasi Dan Koordinasi Program***

Pengabdian akan berjalan lancar jika semua pihak memahami maksud dan tujuan dari pengabdian. Hal tersebut dilakukan sosialisasi dan koordinasi program kepada pihak terkait. Pihak terkait diantaranya adalah LP2M IAIN Tulungagung, pimpinan Jama'ah Yasin Tahlil.

Sosialisasi dan koordinasi dilakukan berupa: *pertama*, Permohonan pengantar izin pengabdian masyarakat dari LP2M IAIN Tulungagung yang dilaksanakan oleh Binti Nur Asiyah pada tanggal Rabu, 16 September 2015. Rekomendasi izin pengabdian dikoordinasikan kepada jama'ah yang dilakukan oleh Binti Nur Asiyah pada hari Minggu, 27 September 2015. Jama'ah Yasin Tahlil memberikan izin tim untuk menyelenggarakan pengabdian di jama'ah tersebut. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan menggali masalah yang ada di dalam jama'ah secara bersama-sama antara tim dan jama'ah.

### **Pelatihan Pengelolaan Pembiayaan Mikro Syariah**

Masalah yang ada dalam jama'ah adalah adanya pengelolaan tabungan yang dikelola ala kadarnya. Masalah demikian direspon dengan diadakannya Pelatihan pengelolaan pembiayaan mikro syariah dilaksanakan di Lesehan Nirwana Bambu desa Kalangan Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada hari Senin, 26 Oktober 2015. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang diantaranya terdiri dari 1 orang nara sumber dari stakeholders (Bapak Misni, SE dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung), 1 orang nara sumber dari unsur tim (M. Aqim Adlan, M.E.I), 1 orang moderator (Binti Nur Asiyah, M.Si.), 1 orang dari kepala desa (ibu Minowati), 2 Orang Tokoh Agama (KH. Mansur Ghozali dan Drs. Maulana Malik) , 3 orang dari tim

serta 11 orang dari unsur jama'ah sekaligus menjadi pengelola KJKMS (Kelompok Jasa Keuangan Mikro Syariah).

Hasil dari kegiatan tersebut adalah: *pertama*, Pengelola KJKMS (Kelompok Jasa Keuangan Mikro Syariah) dari unsur jama'ah memiliki pemahaman terkait pengelolaan pembiayaan mikro syariah. *Kedua*, Pengelola KJKMS (Kelompok Jasa Keuangan Mikro Syariah) memiliki keahlian dalam mengelola pembiayaan pada KJKMS (Kelompok Jasa Keuangan Mikro Syariah). *Ketiga*, Kelembagaan Koperasi Syariah didirikan atas adanya rapat pembentukan koperasi yang diikuti oleh anggota minimal 20 orang dan dihadiri oleh pejabat dari dinas Koperasi dan UMKM serta memiliki modal minimal Rp.15.000.000,-.

Hasil pelatihan di atas ditindaklanjuti oleh jama'ah dengan meningkatkan kepemilikan modal. Jika modal sudah terpenuhi, langkah selanjutnya menyamakan persepsi dengan menghadirkan dinas koperasi untuk melembagakan kelompok jasa keuangan mikro syariah al-Barakah menjadi Koperasi Syariah. Pihak dinas koperasi juga merekomendasikan agar pengelolaan pembiayaan ini dikelola secara legal. Pihak dinas koperasi juga memberikan gambaran jika namanya lembaga, maka izin legalitas ke Otoritas Jasa Keuangan, namun jika kelembagaan berupa koperasi, maka izinnya dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung.

### **FGD Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga**

Kesempatan menabung jama'ah yang masih ala kadarnya disebabkan oleh rendahnya kemampuan menyisihkan keuangan setiap harinya, bahkan jarang yang dilakukan dengan perencanaan yang baik. Kondisi demikian direspon dengan melaksanakan kegiatan FGD pengelolaan ekonomi rumah tangga dilaksanakan di rumah bapak Sarni ibu Rohmah dsn. Panjerejo Kidul RT 01 RW XI Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada Minggu 13 September 2015.

FGD pengelolaan Ekonomi rumah tangga diikuti oleh para jama'ah yang berjumlah 52 orang yang terdiri dari 47 orang peserta, 1 orang nara sumber (Ibu Binti Nur Asiyah, M.Si.), 1 orang moderator (M.Aqim Adlan, M.E.I), dan 3 orang dari tim. Hasil dari kegiatan tersebut adalah: *pertama*, Adanya pemahaman arti pentingnya pengelolaan ekonomi di dalam rumah tangga, *kedua*, Munculnya kesadaran merencanakan setiap pengeluaran di dalam rumah tangga, *ketiga*, Kesadaran dan trampil di dalam mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran rumah tangga, *keempat*, Kesadaran memanfaatkan potensi keluarga untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Setelah mengikuti FGD pengelolaan ekonomi rumah tangga, semangat para jama'ah untuk memanfaatkan potensi keluarga sangat tinggi, mulai merencanakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam hal pencatataan, meskipun masih adanya kelemahan berupa kurangnya kebiasaan catat-mencatat, namun usaha untuk memulai mencatat patut dihargai menuju pencatatan yang sempurna.

### **Pencairan Modal Bergulir Kepada Jama'ah**

Rendahnya tabungan yang bisa dikelola jama'ah tidak seberapa. Hal itu disebabkan karena minimnya pendapatan jama'ah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan jama'ah, maka jama'ah diberi kesempatan untuk tambahan modal bergulir untuk membuat usaha baru atau untuk meningkatkan usaha yang sudah ada. Kegiatan pencairan modal bergulir periode kedua kepada jama'ah dilaksanakan di rumah ibu Nur Sarifah pada hari Minggu, 8 Mei 2016.

Keadaan Dana bergulir yang sudah berhasil diterimakan pada periode kedua sebanyak Rp.7.200.000,- untuk 16 orang. Sedangkan 4.950.000,- masih dalam proses pembiayaan dan akan dibayar lunas pada akhir bulan Syawal. Sejumlah dana tersebut diberikan kepada jama'ah secara bergulir, atau bergantian. Jangka waktu yang diberikan adalah 6 bulan. Setelah 6 bulan, sejumlah dana tersebut di kembalikan kepada jama'ah dan dipinjamkan kembali kepada jama'ah yang belum pernah mendapat dan yang sudah mendapat dalam kerangka meningkatkan usaha.

Perguliran yang dilaksanakan dengan menggunakan akad qardh dan akad murabahah. Akad ini yang dipilih oleh jama'ah diantara akad-akad yang dikenalkan oleh tim pengabdian diantaranya akad jual beli, bagi hasil dan jasa. Akad qardh hanya diberikan kepada jama'ah yang memerlukan dana untuk biaya anak sekolah. Sedangkan akad murabahah diberikan kepada jama'ah yang membutuhkan peningkatan kebutuhan untuk produktifitas.

### **Pelatihan Kewirausahaan Jahe Instant**

Masalah mendasar jama'ah adalah rendahnya kesempatan menabung yang disebabkan oleh pendapatan rendah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan, maka jama'ah perlu untuk diberikan skill (keahlian) tertentu. Pelatihan kewirausahaan jahe instant dilaksanakan di rumah bapak Kamianto ibu Sulikah desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada hari Sabtu, 28 Nopember 2015. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1 orang nara sumber (Ibu Rohmawati, MA.) dan moderator Binti Nur

Asiyah, M.Si., tiga orang dari tim pengabdian (inti dan mahasiswa) dan 47 peserta dari jama'ah Yasin Tahlil.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah *pertama*, Jama'ah memiliki pemahaman terkait dengan upaya untuk menambah pendapatan keluarga dengan memanfaatkan tanaman jahe untuk dibuat jahe instant dan sirup jahe. *Kedua*, Jama'ah memiliki keahlian tentang pembuatan jahe instant dan sirup jahe. *Ketiga*, Jama'ah mendapatkan pemahaman tentang pengemasan dan pemasaran jahe instant dan sirup jahe.

### **FGD Ekonomi Syariah**

Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan jasa keuangan mikro syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap ekonomi syariah kepada jama'ah dan pengelola. Hal tersebut direspon dengan melaksanakan FGD Ekonomi syariah yang dilaksanakan di rumah Bapak Jumali ibu Kartini desa Panjerejo RT 01 RW XI Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pada hari Minggu 16 Agustus 2015. FGD Ekonomi syariah diikuti oleh para jama'ah yang berjumlah 52 orang yang terdiri dari 47 orang peserta, 1 orang nara sumber (Rohmawati, MA.), 1 orang moderator (Binti Nur Asiyah), dan 3 orang dari tim.

Hasil dari FGD Ekonomi syariah adalah adanya pemahaman terhadap ekonomi syariah, diantaranya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam ekonomi syariah meliputi keadilan, keseimbangan, kepemilikan yang harus termanifestasikan di dalam kegiatan mu'amalah dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain itu dalam kegiatan mu'amalah juga terdapat hal yang harus di jauhi dan dihindari yaitu riba, gharar, maysir, ikhtikar dan khanz. Nilai sosial juga harus berkembang di dalam bermu'amalah diantaranya zakat, infaq dan shodaqoh.

### **Laporan Focus Group Discussion Hasil Pengabdian**

Bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengabdian direspon dengan diadakannya dengan Focus Group discussion. Focus Group Discussion pengelolaan jasa keuangan mikro syariah dilaksanakan di Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung pada hari Senin, 07 Desember 2015. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1 orang nara sumber (Moh. Arif, M.Pd.) selaku ketua Pengabdian LP2M IAIN Tulungagung, periode 2014-2018 sekaligus penyaji laporan lima orang dari tim pengabdian (inti dan mahasiswa) dan 47 peserta dari unsur dosen dan mahasiswa.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) pengabdian antara lain: *pertama*, Semangat Pengelolaan KJKMS sangat tinggi, terlihat dari angsuran yang sudah mulai masuk. *Kedua*, Proses menabung jama'ah terus meningkat, oleh karenanya proses akuntabilitas dalam pengelolaan diperlukan. *Ketiga*, Rekomendasi kepada jama'ah, meskipun proses pengabdian sudah selesai, namun tetap dilakukan pendampingan, agar pengelolaan KJKMS terus berjalan, dan modal dan manfaat KJKMS terus meningkat. *Keempat*, Upaya legalitas untuk terus diupayakan sampai permodalan sebagai syarat berdirinya koperasi tercapai.

### **Pendampingan Pengelolaan Jasa Keuangan Mikro Syariah**

Pendampingan pengelolaan Jasa Keuangan Mikro Syariah dilaksanakan dalam rangka menajamkan terhadap pengelolaan keuangan jama'ah. Pendampingan pengelolaan Jasa Keuangan Mikro Syariah dilaksanakan pada setiap hari minggu selama 8 minggu yakni sejak Minggu, 8 Nopember sampai dengan 27 Desember 2015 bertempat di sela-sela yasinan sedang berlangsung. Pendampingan pengelolaan KJKMS dilakukan oleh 3 orang tim inti pengabdian (Binti Nur Asiyah, M.Si., Rohmawati, M.A. M. Aqim Adlan, M.E.I) dan 2 orang tim dari mahasiswa (M. Fatkhur Rohman al Banjari, Aprilia Dwi Anggraini) dan dua orang dari jama'ah (Ibu surati (pimpinan jama'ah), Ibu Nur Sarifah (Ketua KJKMS)).

Hasil pendampingan pengelolaan jasa keuangan mikro syariah adalah *pertama*, Terbentuknya struktur KJKMS. *Kedua*, Terbentuknya Tupoksi pengurus KJKMS. *Ketiga*, Meningkatnya kemampuan pengelolaan KJKMS terkait pembukuan Kas. *Keempat*, Meningkatkan kemampuan pengelolaan KJKMS terkait Pembukuan Neraca. *Kelima*, Meningkatkan kemampuan pengelolaan KJKMS terkait Pembukuan Laba-Rugi. *Keenam*, Meningkatkan kemampuan divisi pembiayaan. *Ketujuh*, Meningkatkan kemampuan divisi funding. *Kedelapan*, Meningkatkan kemampuan kerjasama.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah *pertama*, hasil penggalan masalah oleh jamaah adalah perlunya dilaksanakan pengabdian pengelolaan jasa keuangan mikro syariah, *Kedua*, penguatan pengelolaan jasa keuangan mikro syariah dilakukan dengan melatih dalam pengelolaan tabungan, pembiayaan dan terbentuknya Kelompok Jasa keuangan mikro syariah (KJKMS) Al-Barakah. *Ketiga*, pengelolaan ekonomi rumah tangga

dilakukan dengan FGD pengelolaan ekonomi rumah tangga yang terkait perencanaan menggunakan dan mendapatkan dana untuk mencukupi kebutuhan keluarga. *Keempat*, akses pembiayaan bagi jama'ah dilakukan dengan memberikan alokasi dana pemberdayaan sebesar Rp.12.150.000,- untuk kegiatan pembiayaan, *Kelima*, peningkatan kewirausahaan dilakukan dengan memberikan ketrampilan tambahan berupa pelatihan kewirausahaan jahe instant, *Keenam*, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan dengan FGD ekonomi syariah dan memantapkan pengenalan ekonomi syariah pada setiap pada tabungan wadiah, pembiayaan murabahah dan qardh. Dari kegiatan pengabdian yang dilangsungkan di akhir periode pendampingan terlihat adanya peningkatan tabungan, peningkatan jama'ah yang mulai menabung.

### Daftar Pustaka

*Access Alliance Multicultural Health and Community Services, Community Based research toolkit*, 500-340 College Street, (Toronto, ON, Canada M5S 3G3; 2012)

Alexander, Jenifer, *Wanita Pengusaha di Pasar-Pasar Jawa*, dalam Robert Hefner, *Budaya Pasar: Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalis Asia Baru*, LP3ES, Jakarta, 2000, h. 285-314.

Boserup, Esther, *Women Role in Economic Development*, dalam Mosse, Julia C. *Gender dan Pembangunan*, (terj.), Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1996.

Hart, Keith, *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, *Journal of Modern African Studies*, Vol. 11, No. 1, 1973, h.61-69, dalam A.J. Pitoyo, *Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis*, *Populasi*, Vol.10 No..2 , 1999.

Johan Kristanto, *Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya*, *Journal Publika*, volume 1 no 2 (2013).

Kaspini, *Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas*, Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2009 diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/4819/>

Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, BPEE, Yogyakarta, 1998

- Outlook Perbankan Syariah 2014 diakses pada [www. bi.go.id](http://www.bi.go.id) online
- Purnamadewi, Yeti L., *Wanitadan Industri Rumah Tangga Anyaman Bambu di Desa Nagrog, Kec.Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat*, PSP-IPB, ISS, PPLH-ITB, Bandung, 1990.
- Prijono dan Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan; Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*, Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2007
- Saleh, IrsanAzhary, *Industri Kecil, sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, LP3ES, Jakarta,1986.
- Schiller, Barbara M., *Women, Work and Status in Rural Java*, Ohio University, Ohio, 1978.
- Scoot; James C, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan Subsistensi di Asia Tenggara* , 1976, Terjmh., Hasan Basri, LP3ES, Jakarta, 1981.
- Sethuraman, 1981; Mazumdar,1984; Adams, 1995 ; A.J. Pitoyo, *Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis*, Populasi Vol.10 ,No. 2, Buletin PSKK-UGM, Yogyakarta, 1999.
- Sihite,R.R.,*Pola Kegiatan Wanita di sektor Informal, Khususnya Pedagang Sayur Di Pasar*, Dalam T.O. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Soeharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Statistik perbankan Syariah edisi Desember 2014 diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Sumodiningrat, G, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1997.

